

ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja berdasarkan RPJMD Kota Pariaman

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya	1. Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui memaksimalkan masjid dan lingkungannya, pondok pendidikan Al-Qur'an dan Hafiz; 2. Meningkatkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan lingkungan serta perilaku hidup sehat, masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sehingga derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tentram dan tertib dengan berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan Ham.	Memperkuat Rasa Aman dan Tentram dalam Kehidupan Bermasyarakat & Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah yang Bersih, Akuntabel, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi dan Smart City.	Meningkatnya Persentase Anggota Perempuan dalam Partai Politik	Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

	meningkat; 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang; 5. Menerapkan manajemen bersih dan anti KKN dalam pengelolaan Pemerintah Kota yang bersih, efektif, dan terpercaya; 6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 7. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
--	--	--	--	--	---

	mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 8. Mewujudkan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur dan strategi pembangunan sosial; 9. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat yang merupakan perpanjangan tangan pembangunan; 10. Membangun ketahanan Budaya dan Pariwisata.				
--	---	--	--	--	--

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Masih timpangnya peminat/anggola antara laki-laki dan perempuan Partai Politik. Kesenjangan APKM : Akses : - Partisipasi : Minat perempuan tidak begitu tinggi untuk berkontribusi dalam partai politik Kontrol : Perempuan cenderung kurang diberi kesempatan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam partai politik Manfaat : -	- Status ekonomi dan materi - SDM yang tidak mencukupi - Belum terlaksananya pemilihan anggota secara demokratis Penyebab Sub Keg belum responsif gender : a. Faktor Internal - Terbatasnya jumlah SDM b. Faktor Eksternal - Rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik	Rencana Aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender : - Informasi responsif gender bagi pelaksana; - Bantuan Keuangan Partai Politik - Pendidikan politik - Pemantauan situasi politik	Identifikasi PD : - Seksi Organisasi Politik dan Masyarakat Identifikasi Program : Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan

Deskriminasi Gender : - Marginalisasi : Bahwa perempuan cukup di domestik - Sterotip : Pemimpin itu sebaiknya laki-laki tetapi perempuan tidak			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tujuan : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Sasaran : Perempuan yang bergabung dalam Partai Politik Keluaran : Jumlah anggota perempuan dan laki-laki tidak mengalami ketimpangan Input : Anggaran Rp. 1.250.000.000 Output : Jumlah anggota perempuan dan laki-laki tidak mengalami ketimpangan Outcome : Meningkatnya persentase anggota perempuan dalam Partai Politik Impact : Meningkatnya kesadaran
---	--	--	--

			perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia Partai Politik
--	--	--	---

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Informasi responsif gender bagi pelaksana; - Bantuan Keuangan Partai Politik - Pendidikan politik - Pemantauan situasi politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Seksi Organisasi Politik dan Masyarakat / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman.

Pariaman, Juni 2026
Penanggung Jawab Kegiatan



AFDILA, S.Kom. M.A.P

NIP. 19880320 201001 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
"GENDER ACTION BUDGET (GAB)"
SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
Program	: Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Kode Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.03
Kinerja	: Adanya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator	: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
Satuan	: 51432 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- d. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD.

2. Gambaran Umum

Salah satu aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Lembaga Demokrasi, dimana variabel yang ke 9 adalah Peran Partai Politik. Peranan Partai Politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis. Karena dengan adanya Partai Politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas, maka organisasi Partai Politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya. Peranan Partai Politik tidak hanya sebagai organisasi politik, akan tetapi sebuah organisasi yang memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui Pendidikan Politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis. Partai Politik mempunyai hak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk Kota Pariaman telah dituangkan dalam Perwako Nomor 56 Tahun 2019. Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tata cara pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Sub Kegiatan ini adalah 8 Partai Politik

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan : Swakelola & Non Pengadaan

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Informasi responsif gender bagi pelaksana;
- Bantuan Keuangan Partai Politik (Bulan 6)
- Pemantauan Situasi Politik (Bulan 1-12)

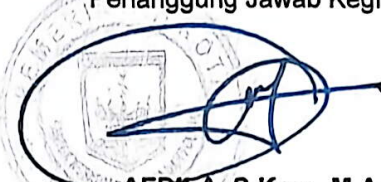
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 bulan

E. Biaya yang Dikeluarkan

Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.250.000.000 (Satu Milliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pariaman, Juni 2026
Penanggung Jawab Kegiatan



AFDILA, S.Kom, M.A.P
NIP. 19880320 201001 1 002

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026



INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN
MASNUR, SE, MM
NIP. 197004181990031001



KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN
YENNI RESVIANTI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003



KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN
BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003



PLT KEPALA
DP3AKB KOTA PARIAMAN
IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001